

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar 1945 (amandemen ke 4), Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, MA-Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.*
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung RI., 2009.*
- Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah Kedudukan dan Kewenangan), (Yogyakarta : UII Press, 2007).*
- Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, (Jakarta : Gramata Publishing, 2010).*
- Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) yang terkait erat dan sekaligus sebagai hukum acara formil sengketa ekonomi syari'ah sampai saat ini masih dalam proses penggodokan di Mahkamah Agung RI. Kehadiran KHAES sangat dinanti-nantikan oleh para praktisi hukum, baik Hakim, Panitera mapun Pengacara yang menangani kasus ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.*
- Salinan Putusan Nomor ; 19 / Pdt. Bth / 2020 / PN Mjl. Putusan Perdata Gugatan Nomor 19 / Pdt Bth / 2020 / PN Mjl.*
- Akad musyarakah Nomor : 06 tertanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Lala Sunara,ST., SH., Mkn.*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*
- Gugatan Perlawanan Pelawan PT. BELFAST UTAMA terhadap Terlawan III (Bank Syariah mandiri) sebagai Pihak Terlawan, tertanggal 20 desember 2020.*
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.*
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.*

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004).

Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan hak Asasi manusia.

undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-undang Nomorn 31 Tahun 2997 Tentang Peradilan Militer.

Prof. Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku "Putih Hitam Pengadlilan Khusus" terbitan Komisi Yudisial Terbitan pertama tahun 2013.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Marwini, *Aplikasi Pembiayaan Murabahah produk KPRS di Perbankan Syariah*, vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 147.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, Penerbit, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Nunung Rodliyah, *Hukum Peradilan Agama*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah dan Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syari'ah Charge Card, www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa, (Diakses pada November 2021).
- H. Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Makalah Orasi Ilmiah Pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 30 Agustus 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Edisi Revisi, Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa, (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2016).
- H.M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, (Jakarta: eLSAS, 2006).
- Etika Rahmawati, *Telaah Terhadap Personalitas Keislaman Dikaitkan Dengan Teori Receptio In Complexu*, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1593>, (diakses tanggal 10 Agustus 2016).

A. Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Penerapan Asas (Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama, (Jakarta : Varia Peradilan, 2000).*

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).*

Eman Suparman, *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Menurut Prinsip Syariah.*

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 34-35.*

Dr. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. *Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah, Edisi Pertama Cetakan Ke-1 April 2021.*

www.lifepal.co.id/memahami-arti-nisbah/ dibuka pada bulan November 2021.

Gross Risalah Lelang Nomor 319/35/2020 Lembaran Pertama, tertanggal 15 Juli 2020.
Risalah Panggilan Aanmaning nomor 3/pdt.Eks/2020/PN. Mjl. Tertanggal 23 November 2020.